



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

NOMOR : 186 /KPTUN.W8 – TUN3/SK.TI1/I/2026

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN 2026**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka membangun aparatur sipil negara yang professional dan produktif di lingkungan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura perlu adanya analisis jabatan dan analisis jabatan beban kerja yang sistematis untuk merumuskan informasi jabatan yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 2. Bahwa untuk peningkatan pelaksanaan tugas yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab demi terselenggaranya asas peradilan cepat, sederhana dan murah;
 3. Bahwa untuk memenuhi maksud diatas, dipandang perlu membentuk Kembali Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penunjuk Teknis Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Mahkamah Agung RI nomr 4 Thun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN 2026.
- Pertama : Membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampran I Keputusan ini;
- Kedua : Tim tersebut bertugas dan bertanggung Jawab untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 21 Januari 2026



**TIM EVALUATOR AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

NO	NAMA	JABATAN	
		JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Merna cinthia, SH., MH.	Ketua	Ketua
2.	Suyadi, S.H.	Panitera	Sekretaris I
3.	Fefi Yanti Thomas, SE.	Sekretaris	Sekretaris II
4.	Aderudianto, A.Md.	Panmud Perkara	Anggota
5.	Jerika W. Risakotta, SH., MH.	Panitera Muda Hukum	Anggota
6.	Indra Febrian, SH.	Kasubbag Umum & Keuangan	Anggota
7.	Fitri Yulyanti, SH.	Kasubbag Kepeg ORTALA	Anggota
8.	Rafika, S.Pt.	Kasubbag PTIP	Anggota
9.	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama (Pejabat Pembuat Komitmen)	Anggota
10.	Christina M.Y. Rohrohmana, SH.	Jurusita Pengganti (Bendahara Pengeluaran)	Anggota
11.	Yeyen M.F Suli, Amd. Kom.	Jurusita Pengganti (Bendahara Penerima)	Anggota
12.	Muhammad Nabil, SH	APP	Anggota
13.	M. Iltizam, SH	APP	Anggota

Ditetapkan : di Jayapura
Pada Tanggal : 21 Januari 2026


KETUA

MERNA CINTHIA